

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2001-2010

Fara Dina

Program Studi Manajemen Informatika, AMIK "BSI Pontianak"

Jl. Abdurahman Saleh No.18A, Pontianak, Indonesia

fara3007@bsi.ac.id

Abstract

Efforts to increase revenue Local Government Original Receipt can be done by increasing the effectiveness of the collection, by optimizing the potential that exists and will continue to be exploring new revenue sources that allow it to be in potential tax collection or levy. This study aims to analyze the effect of government contribution of third party, Investment income the value of the vehicle and West Kalimantan Province. This research use secondary data (eries times) of year 2001 to 2010. To achieve the research objectives were used regression analysis model and followed by statistical and econometric testing. Result estimates of third party variable showing the negative effect, that mean if increment total contribution of third party occur will bring on contribution of third party reduction as big as 0,03. Should this variable have positive effect. But variables such third party contributions have a significant effect to local government original receipt. Regression estimation result indicate that the variable two-wheeled vehicles or more, have a positive effect but not significant effect on PAD. It means if there is an increase the number of two-wheeled vehicles or more, as much as one rupiah of revenue will decrease by 63,25 rupiah. Regression estimation result indicate that the variable four-wheeled vehicles or more, have a positive effect and significant effect on PAD. It means if there is an increase the number of four-wheeled vehicles or more, as much as one rupiah of revenue will increase by 6.952 rupiah. The estimation of regional investment variable shows a positive and significant influence if means increase in the amount of investment in the region will increase revenue by 42,66 rupiah.

Key words : Local Goverment Original Receipt of West Kalimantan Province

1. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah memberikan kewenangan keuangan (desentralisasi ekonomi) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan, yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan

menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan untuk dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan ini, menyebabkan terjadinya

disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Dalam sistem otonomi bertingkat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974, rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau realisasi APBD bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Istilah "bukan masalah besar" tersebut merujuk pada kenyataan bahwa otonomi yang dikembangkan diimplementasikan dengan penyerahan urusan pusat pada daerah.

Munculnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut. Dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada Posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Keuntungan dari sistem otonomi daerah adalah eksistensi Pemerintah Daerah dalam menciptakan kesejahteraan secara demokratis. Inti pelaksanaan otonomi terdapat pada keleluasaan pemerintah daerah atas dasar prasarana dan kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dalam konteks pengembangan kompetensi ekonomi daerah, pemerintah Kota Pontianak diuntut untuk mendayagunakan dana dengan prioritas pada sektor produktif yang berlanjut atau memiliki kesinambungan yang berarti menggerakkan ekonomi masyarakat.

Tujuan kebijakan desentralisasi adalah: mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah; peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah. Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya.

Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Selama ini sumber dana PAD di Kalimantan Barat mencerminkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat dominan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bagi Hasil Pajak Provinsi

Bagi hasil pajak provinsi adalah “bagi hasil pajak provinsi yang terdapat pada pasal ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten / kota di wilayah provinsi yang bersangkutan” (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28, 2009:2) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
3. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
4. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

2.2 Pajak Provinsi

Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah berupa pungutan yang didasarkan pada undang-undang dan dapat dipaksakan kepada subyeknya tanpa batas yang langsung dapat ditunjukkan. Sebagaimana fungsi pajak dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak, maka hukum pajak dibagi dua macam:

1. Materiil, bermuatan norma-norma antara lain keadaan, perbuatan, obyek, subyek, tarif, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Formil, memuat tata cara dalam norma materiil yang mencakup : prosedur, hak-hak dan kewajiban wajib pajak.

2.3 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 28 (2009:3) “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

2.5 Investasi Daerah

Menurut Undang-undang Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 (2006:5) “Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.”

2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-undang Peraturan Menteri dalam Negeri 2006 Pasal 22-76 hal. 11 menyebutkan bahwa Kebijakan fiskal biasanya diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah. Anggaran tersebut menggambarkan rincian kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan dalam

rupiah untuk suatu periode tertentu dan merupakan penjabaran dari GBHN dan Repelita.

2.7 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan Negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. metode deskriptif yaitu menggambarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tujuan penelitian seperti apa adanya, dengan mengumpulkan data dan menjelaskan data yang diperoleh sesuai dengan keperluan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu dokumen data yang ada pada Dinas atau Instansi terkait dan literatur serta data-data lain yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini menggunakan data series tahun 2001

sampai dengan 2010. Data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Data APBD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010.
2. Data Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010.
3. Data Jumlah Pendapatan Kendaraan Bermotor di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010.
4. Data mengenai Sumbangan Pihak Ketiga Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010.

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui media perantara). Adapun data primer yang diperoleh dari:

1. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2010.
3. Data atau informasi yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Teknis Analisis Data

1. Analisis Regresi
2. Pengujian Statistik
3. Uji Dependent Variabel: PAD Ekonometrika

4. PEMBAHASAN

Hasil regresi yang diolah dari Dispenda Provinsi Kalimantan Barat terlihat pada Gambar 1 sebagai berikut.

Method: Least Squares
 Date: 12/17/12 Time: 10:44
 Sample: 2001 2010
 Included observations: 10

Variable	Coefficient t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Sp3	-0.030441	0.006906	-4.407721	0.0070
RODA4	6952.022	2409.217	2.885594	0.0344
RODA2	63.25526	928.6023	0.068119	0.9483
INVESTASI C	42.66573 2.64E+10	23.47492 2.87E+10	1.817503 0.921582	0.1288 0.3990
R-squared	0.941327	Mean dependent var	2.34E+11	
Adjusted R-squared	0.894389	S.D. dependent var	7.17E+10	
S.E. of regression	2.33E+10	Akaike info criterion	50.88712	
Sum squared resid	2.71E+21	Schwarz criterion	51.03841	
Log likelihood	-249.4356	F-statistic	20.05461	
Durbin-Watsonstat	2.872490	Prob(F-statistic)	0.002796	

Sumber Data: Dispenda Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Gambar 1 Hasil Regresi

Persamaan di atas diketahui bahwa:

1. Sumbangan Pihak Ketiga

Hasil perhitungan variabel sumbangan pihak ketiga menunjukkan pengaruh yang negatif, artinya apabila terjadi kenaikan jumlah jumlah pihak ketiga akan menyebabkan terjadinya penurunan sebesar 0,03 rupiah dari penerimaan PAD, secara teori seharusnya variabel sumbangan pihak ketiga mempunyai nilai yang positif. Namun demikian variabel sumbangan pihak ketiga tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Hasil estimasi dari variabel sumbangan pihak ketiga tidak sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan yaitu variabel transfer pemerintah ke daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Variabel sumbangan pihak ketiga yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi, sehingga belum mampu mendorong kegiatan perekonomian di Kalimantan Barat.

2. Pengaruh Variabel Nilai Kendaraan Roda 2.

Hasil perhitungan estimasi regresi koefisien sebesar 63,25526 menunjukkan bahwa variabel kendaraan roda 2 mempunyai pengaruh yang positif, artinya apabila terjadi kenaikan pada jumlah kendaraan roda 2 maka akan meningkatkan penerimaan PAD dari pembayaran pajak kendaraan roda 2 atau lebih. Jika di lihat dari t hitung sebesar 0,068119 < t tabel (1,440) dengan angka signifikansi 0,9483 > 0,1 tidak pengaruh yang signifikan antara nilai kendaraan roda 2 atau lebih terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal ini bisa disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak jika di lihat dari pengguna kendaraan dari tahun sebelumnya dengan pengguna kendaraan baru, serta mudahnya pengambilan kendaraan roda 2 dengan pembelian secara kredit sehingga pembelian tersebut macet dan menyebabkan terjadinya penumpukan di dealer motor second dan akhirnya terjadilah pajak yang belum disetor oleh pemilik kendaraan roda 2 yang sepenuhnya adalah tanggung jawab dealer.

3. Pengaruh Variabel Nilai Kendaraan Roda 4 atau Lebih.

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel kendaraan roda 4 atau lebih mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, artinya apabila terjadi kenaikan pada jumlah kendaraan maka akan meningkatkan pendapatan dari pembayaran pajak pada kendaraan roda 4 atau lebih. Setiap kenaikan pada jumlah kendaraan akan meningkatkan penerimaan PAD sebesar 6952,022. Jika di lihat dari t

hitung sebesar $2,885594 > t$ tabel (1,440) dengan angka signifikansi $0,0344 < 0,1$ terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai kendaraan roda 4 atau lebih terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Pengaruh Variabel Investasi Daerah.

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel investasi daerah terhadap pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif antara investasi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kalimantan Barat. Setiap kenaikan 1 Rupiah akan menaikkan 42,66573 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Semakin tinggi investasi daerah, maka akan berdampak pada meningkatnya dividen yang masuk ke kas daerah Provinsi Kalimantan Barat. Karena investasi yang ditanamkan oleh para investor menyerap cukup banyak tenaga kerja di daerah tersebut.

roda 2 atau lebih, berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pendapatan kendaraan roda 4 atau lebih, berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pada tingkat alpha 1% menunjukkan pertumbuhan PAD sebesar 6952,022 jika nilai pendapatan kendaraan roda 4 atau lebih, bertambah satu-satuan maka berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat. Koefisien regresi sebesar 42,66573 menunjukkan bahwa variabel investasi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sumbangan pihak ketiga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai pendapatan kendaraan roda 2 berpengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat. Koefisien regresi sebesar 63,25526 menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan mengacu hasil penelitian, penulis mengemukakan sejumlah saran guna meningkatkan PAD, yaitu:

1. Pemerintah daerah agar berusaha untuk mendapatkan bagi hasil dari pusat terkait sumberdaya daerah yang penerimaannya disetor seluruhnya ke pusat, sebagai contoh bagi hasil cukai yang semuanya merupakan penerimaan pemerintah pusat.
2. Membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor khususnya kendaraan bekas, sehingga semua kendaraan terdaftar dengan baik dan masyarakat bergairah untuk memiliki kendaraan bermotor yang

harganya terjangkau walaupun bekas, sehingga dengan meningkatnya pemilik kendaraan bermotor akan berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat dan dengan demikian PAD juga akan meningkat.

3. Perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, atau menambah jumlah outlet pembayaran pajak kendaraan bermotor dan memanfaatkan jasa perbankan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan banyaknya outlet pembayaran pajak kendaraan bermotor, akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat secara efektif dapat diterima oleh kas daerah.
4. Bekerja sama dengan aparat kepolisian setiap melakukan raja kelengkapan surat berkendara juga melakukan raja pembayaran pajak, sehingga setiap kendaraan roda 4 maupun roda 2 bagi yang belum melunasi langsung dapat sanksi di tempat.
5. Melaksanakan investasi pada usaha-usaha yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan

berpartisipasi pada mega proyek yang ada di daerahnya sehingga dapat menambah penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Pendapatan Regional. Kalimantan Barat Tahun 2001 s/d 2010, Kerjasama Bappeda dan BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2001 s/d 2010. Kerjasama Bappeda dan BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.